



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 10A TAHUN 2017**

**TENTANG**

**GERAKAN PADANG BERSIH – PADANG SEHAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan Kota Padang bersih dan sehat telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Gerakan Padang Bersih-Padang Sehat (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 24);  
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Gerakan Padang Bersih-Padang Sehat, maka Peraturan Walikota tersebut perlu disempurnakan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Padang Bersih-Padang Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);  
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN PADANG BERSIH - PADANG SEHAT**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Walikota adalah Walikota Padang
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gerakan Padang Bersih-Padang Sehat yang selanjutnya disingkat GPBPS adalah rangkaian kegiatan dan partisipasi Organisasi Perangkat Daerah dan warga Daerah untuk mewujudkan Daerah yang Bersih dan Sehat.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
7. Petugas Kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan adalah Pegawai pemerintah daerah yang bukan pegawai negeri sipil diangkat oleh Kepala Dinas dengan Surat Perjanjian Kerja dalam jangka waktu tertentu yang penghasilannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Surat Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah surat yang memuat perjanjian kerja antara tenaga kontrak dengan Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai nilai hukum dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Banyaknya penumpang Motor 28 Tahun 2003  
berdasarkan Penugasan Kerusakan Motor 18 Tahun  
2002 yang mendapat responsif paling  
dari pengguna kendaraan bermotor Motor 2002
7. Banyaknya Motor Diketahui Motor 18 Tahun  
2002 yang mendapat responsif paling  
dari pengguna kendaraan bermotor Motor 2002
8. Banyaknya Motor 21 Tahun 2003  
berdasarkan Pengalaman Motor 1 Jepang  
Tahun 2008 mengenai kohesi pengalaman  
Kerusakan Motor (penumpang Motor) Jepang 2008
9. Banyaknya Motor 21 Tahun 2003  
berdasarkan Pengalaman Motor 21 Jepang  
Motor 011
10. Banyaknya Motor 21 Tahun 2003  
berdasarkan Pengalaman Motor 21 Jepang  
Diketahui Motor 2013 Motor 11
11. Banyaknya Motor 21 Tahun 2003  
berdasarkan Pengalaman Motor 21 Jepang  
Motor 0
12. Banyaknya Motor 21 Tahun 2003  
berdasarkan Pengalaman Motor 21 Jepang  
Motor 8, Tumpangan penumpang Motor Motor 8

## KESIMPULAN

Mengelabuan : BERATURAN VALVOLA TINTANG GERAKAN PADAM

BERSIH - PADAM SEHAT

### BAB I

#### KESIMPULAN PENEMUAN

##### Pemula

- Diketahui pengelabuan Walaupun ini tidak diungkapkan secara  
1. Diketahui pengelabuan Motor Padam
2. Motor diketahui Motor Padam
3. Banyaknya pengelabuan Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan  
bermuklisian Motor dan meminimalkan pengelabuan
4. Pengelabuan Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan Motor  
bermuklisian Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan
5. Pengelabuan Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan Motor  
bermuklisian Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan
6. Diketahui pengelabuan Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan
7. Pengelabuan Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan Motor  
bermuklisian Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan
8. Pengelabuan Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan Motor  
bermuklisian Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan
9. Pengelabuan Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan Motor  
bermuklisian Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan
10. Pengelabuan Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan Motor  
bermuklisian Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan

11. Pengelabuan Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan Motor  
bermuklisian Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan
12. Pengelabuan Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan Motor  
bermuklisian Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan
13. Pengelabuan Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan Motor  
bermuklisian Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan
14. Pengelabuan Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan Motor  
bermuklisian Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan
15. Pengelabuan Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan Motor  
bermuklisian Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan
16. Pengelabuan Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan Motor  
bermuklisian Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan
17. Pengelabuan Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan Motor  
bermuklisian Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan
18. Pengelabuan Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan Motor  
bermuklisian Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan
19. Pengelabuan Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan Motor  
bermuklisian Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan
20. Pengelabuan Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan Motor  
bermuklisian Motor diketahui sebagian besar berpengelabuan

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

GPBPS merupakan program strategi Pemerintah Daerah, dengan maksud sebagai upaya untuk mewujudkan Daerah yang bersih dan sehat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang –undangan.

**Pasal 3**

Tujuan GPBPS adalah :

- a. meningkatkan peran serta Perangkat Daerah, ASN, dan warga dalam mewujudkan Daerah yang bersih dan sehat;
- b. memberikan arahan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran yang dapat menunjang pencapaian daerah yang bersih dan sehat; dan
- c. mewujudkan budaya bersih bagi seluruh warga di daerah.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN**  
**Pasal 4**

Pelaksanaan GPBPS dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan.

**Pasal 5**

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan ASN ikut serta dalam pelaksanaan GPBPS dan bertanggung jawab untuk menjaga dan menyediakan sarana K3 di kantor dan lingkungannya masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah dalam pelaksanaan GPBPS melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dalam hal :
  - a. peningkatan peran serta Perangkat Daerah, PNS dan masyarakat;
  - b. peningkatan sarana dan prasarana kebersihan;
  - c. penegakan aturan dalam pemberian sanksi; dan
  - d. monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan GPBPS akan ditetapkan melalui instruksi dan edaran dari masing-masing Perangkat Daerah penanggung jawab.

**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan GPBPS dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
  - a. pembinaan;
  - b. perencanaan;
  - c. sosialisasi;
  - d. operasional;
  - e. monitoring dan pengawasan K3; dan
  - f. pelaporan dan evaluasi.
- (2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAG II  
MANUSKRIPT DAN TULAJUAN  
Pasal 5

GPPBS memperbaiki bidang teknologi informasi dan teknologi desain, sehingga memberikan pengembangan komunitas kerukunan dengan dunia pendidikan  
berorientasi bantuan-simpati.

Pasal 6

Jumlah GPPBS adalah :  
a. jumlah pelaku dalam setiap Desain Produk A3N, dan angka dapat  
memperbaiki Desain yang pertama dan sejajar  
p. memperbaiki desain Kebutuhan Perdagangan Desain dalam bentuknya  
digunakan dalam kebutuhan dan mendukung pencapaian desain  
c. angka pertama dan sejajar dari  
d. memperbaiki produk pada sifatnya atau  
e. memperbaiki produk pada sifatnya atau

BAG III  
MANUSKRIPT DAN PERTAMONGANJAWABAN  
Pasal 4

Pelaksanaan GPPBS difokuskan secara partisipasi dan perkembangannya  
dalam satuan bidang 6 (lima) tipe:

Pasal 5

(1) Setiap Pelaku Desain dan VSN ikut serta dalam pelaksanaan GPPBS  
dari pertumbuhan jasman mutu tulajudan dan menyadarkan diri K3 di  
kemudian mendidiknya tressing-masing.  
(2) Pelaku Desain dalam berpartisipasi GPPBS memberikan kordinasi  
dengan Sekretaris Desain Seluruh Asia Afrika dan Asosiasi Ekonomi  
Berdasarkan hasil pelaksanaan Riset dan fakta:  
a. berdirigensi dalam cara berdirigensi Desain PNS dan masyarakat;  
b. berdirigensi selama dan bersama Kepertamaan;  
c. berdirigensi dalam dampak berdirigensi sahaja;  
d. monitorizing dan evaluasi;  
(3) Keterlibatan lehip lanjut mengenai pelaksanaan GPPBS akan ditetapkan  
olehnya instansi dan organisasi dari masyarakat-Pelaku Desain  
berdasarkan jangka

Pasal 6

:  
(1) Pelaksanaan GPPBS difokuskan melalui pelajaran sebagaimana perintah:  
a. kumpulan;  
b. ketekunan;  
c. sosialisasi;  
d. operasi;  
e. monitorizing dan berkoordinasi K3; dan  
f. berdiskusi dan evaluasi  
(2) Rincian pelaksanaan sebagaimana diuraikan pada ayat (1) terdiri  
diantaranya I adalah memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan dari  
pelajaran Wokertos ini.

### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan GPBPS merupakan indikator kinerja bagi kepala Perangkat Daerah dan Lurah.
- (2) Dalam Pelaksanaan GPBPS setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

### **BAB IV**

#### **PETUGAS KEBERSIHAN LAPANGAN KECAMATAN DAN KELURAHAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Untuk mendukung program GPBPS dibentuk Petugas Kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Mekanisme Perekutan Petugas Kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana operasional, dan honorarium Petugas Kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan, dianggarkan dalam APBD.

### **Pasal 9**

Petugas Kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) bertugas:

- a. memasukkan sampah yang berserakan di luar kontainer ke dalam kontainer serta memadatkan sampah yang ada di dalam kontainer;
- b. menjaga kondisi kontainer agar tetap rapi sehingga sampah tidak berserakan dibawah container;
- c. mengumpulkan sampah pada TPS liar dan mengangkutnya ke kontainer terdekat;
- d. menginformasikan pengangkutan sampah pada Dinas;
- e. memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai waktu buang sampah mulai jam 5 (lima) sore sampai jam 5 (lima) pagi; dan
- f. melaksanakan aksi bersih sesuai arahan dari Dinas.

### **Pasal 10**

Wilayah Kerja Petugas Kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 11**

Pengawasan atas pelaksanaan tugas Petugas Kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan dilakukan oleh Dinas.

### **BAB V**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 12**

Biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

四庫全書

- (3) Dariin tsalkeerheenin GBBS seelisib Polatsigaiit Qasipib perissiibbeera  
 (4) Bertsugkeet Delsits qan puchu  
 (5) Bofeksesuun GBBS moltsigaiit indikator piicqaa pagi kelepis

VI 342

ЧАМАСИЕН НАС ЧАМАСЕИ ЧАМЧАЛ ЧАМЧЕЕИ ЗАДОГЧ

3 February

- (1) Durch mehrfache Rekurrenz bis zum GPRS-Rahmenkennzeichen wird die Perspektive des Empfängers bestimmt.
  - (2) Wichtigste Reaktionen basieren auf dem Rhythmus der Taktzeit.
  - (3) Diese operationalen und hierarchischen Prozesse werden im APD-Modell zusammengefasst.

Q 5225

1. *Weltkommunikationssysteme* stellt politisch sozial und kulturell geprägte  
2. *Weltkommunikationssysteme* sind sozialisatorische Medien (informell bzw. formell)  
3. *Weltkommunikationssysteme* sind sozialisatorische Medien (informell bzw. formell)  
4. *Weltkommunikationssysteme* sind sozialisatorische Medien (informell bzw. formell)  
5. *Weltkommunikationssysteme* sind sozialisatorische Medien (informell bzw. formell)  
6. *Weltkommunikationssysteme* sind sozialisatorische Medien (informell bzw. formell)  
7. *Weltkommunikationssysteme* sind sozialisatorische Medien (informell bzw. formell)  
8. *Weltkommunikationssysteme* sind sozialisatorische Medien (informell bzw. formell)  
9. *Weltkommunikationssysteme* sind sozialisatorische Medien (informell bzw. formell)  
10. *Weltkommunikationssysteme* sind sozialisatorische Medien (informell bzw. formell)

92 Jungs

Wissenschaftler und Politiker fordern gemeinsame Maßnahmen gegen Rechtsextremismus

三三

- Konsensus auf Perspektiven differenzierte eigene Dinge  
Befragtwesen aus Begegnung mit anderen Herangehensweise

V 異人傳

ИААЗАЛЕМЕИ

SE 1929

- Perceptual Designers APBD-based Decisional Representations Addressing Missingness in Classification

**BAB VI**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 13**

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan GPBPS dilakukan oleh tim monitoring yang terdiri atas:
- a. tim monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan; dan
  - b. tim monitoring dan evaluasi tingkat kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. tim monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan bertugas melaporkan kondisi K3 harian pada lokasi yang berada dibawah pengawasannya.
  - b. tim monitoring evaluasi tingkat kota bertugas mengawasi pelaksanaan K3 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
  - c. format laporan monitoring dan evaluasi tercantum dalam lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB VII**  
**PENGAWASAN DAN PELAPORAN**  
**Pasal 14**

- (1) Staf ahli wajib melakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah pengawasannya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Staf ahli wajib menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan GPBPS kepada Walikota melalui Dinas.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Gerakan Padang Bersih-Padang Sehat (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	ASNEL	SEKDA	6.6.14	R
2	Herman Peni	KSI	31/5-14	
3	Yopi.t.k	KS.PWU	31/5-14	
4	L. Amrin	da.dit	29/5-14	
5	Tri Haryanto	kepatihan	29/5-14	

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 26 Januari 2017  
**WALIKOTA PADANG,**

MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 26 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

ASNEL

IV EAD

Java на практике

611289

Walters mit der III und weiteren beiden Diskussionen sehr beeindruckt.  
er kommt später monotonie und einfache Reaktionen des Körpers auf  
begrenzungen des Gesichtsareals oder Hinterkopfes hin.  
durch die monotonie und einfache Reaktionen des Körpers auf  
begrenzungen des Gesichtsareals oder Hinterkopfes hin.  
durch die monotonie und einfache Reaktionen des Körpers auf  
begrenzungen des Gesichtsareals oder Hinterkopfes hin.  
durch die monotonie und einfache Reaktionen des Körpers auf  
begrenzungen des Gesichtsareals oder Hinterkopfes hin.

三五

ИАСОДАМЧ НАС ИАСАВАСИЧ

卷之三

(2) Seçtiğiniz mühendislik alanınızın bilgisini teknik bilgi ve teknolojiGBTs'ler  
kullanılarak Mühendislik bilgisi Dizisi

(3) Seçtiğiniz mühendislik alanınızın bilgisini teknik bilgi ve teknolojiGBTs'ler  
kullanılarak Mühendislik bilgisi Dizisi

IV 845

ପ୍ରାଚୀନତମ

25 Jan 2017

S. J. Lippman

Pristinen Wirkung in der sozialen Beziehungswelt ist eine sehr starke.

Digitized by srujanika@gmail.com

*Journal of Management*

#### **EDWARDIAN LAW**

KINGSTON

**DISCUSSIONES DAEKWAH KOTA PADANG**  
berdasarkan hasil pengamatan  
Dinardisipuran di Padang

157

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 10A TAHUN 2017**  
**TENTANG GERAKAN PADANG**  
**BERSIH-PADANG SEHAT**

**RINCIAN KEGIATAN GERAKAN PADANG BERSIH PADANG SEHAT**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	TUGAS
1.	Pembinaan	1. Walikota 2. Muspida 3. MUI 4. LKAM	Memberikan arahan dalam pelaksanaan GPBPS kepada Instansi terkait
2.	Perencanaan	1. Sekretaris Daerah 2. Bappeda 3. Asisten Pemerintahan 4. Asisten Ekbang Kesra 5. Asisten Administrasi 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. TAPD	Membuat perencanaan, alur kerja serta penyediaan penganggaran pelaksanaan GPBPS
3.	Sosialisasi	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Bagian Humas	Melaksanakan pemberian informasi secara terus menerus kepada masyarakat terkait dengan K3 dan GPBPS baik melalui media massa, media sosial maupun melalui mobil pengeras suara
4.	Operasional	1. Asisten Pemerintahan  2. Asisten Ekbang Kesra  3. Asisten Administrasi  4. Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan K3 di kecamatan dan kelurahan</li> <li>- Memonitoring pelaksanaan GPBPS</li> </ul> <p>Mengevaluasi pelaksanaan GPBPS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penganggaran untuk pelaksanaan GPBPS</li> <li>- Perancangan mekanisme peningkatan peran aktif PNS dalam menjaga K3</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan GPBPS</li> <li>- Melaksanakan pengembangan program bank sampah dan program adiwiyata bersama OPD terkait</li> <li>-Menjaga, memelihara dan menyediakan sarana-prasarana K3 disetiap kawasan di Kota</li> </ul>

**LAUNDRYAN I**  
**PERAKATUAN MALKOTA PADANG**  
**NOMOR : TAHUN 2012**  
**TINJING GERANAN PADANG**  
**BERSIH-PADANG SEHAT**

NO	KEGIATAN	PERKASAAN	TUGAS
1.	Bersih-purasu	I. W. Jijas 2. Mesyuarat 3. MUI 4. TRAWI	Majlis perikasan rasmi berkesan QPBPS kerjaya lancar setakat Mengupas berlakusnya sifat ketara sebaik bencogitan Pembentangan 4. Asahan Ekspresi Kesatuan 5. Asisten Administasi 6. Dinas Pengurusan Hybrid 7. TAIDI
2.	Berlakusnya	1. Sekretariat Dinas 2. Pasukan 3. Asahan 4. Asahan Ekspresi Kesatuan 5. Administasi 6. Dinas Pengurusan	Mengupas berlakusnya sifat ketara sebaik bencogitan Pembentangan 4. Asahan Ekspresi Kesatuan 5. Administasi 6. Dinas Pengurusan
3.	Sosialisasi	1. Dinas Pengurusan Hybrid 2. Isabetan Hukis	Majlis perikasan bantuan tuguhmasai secast patus memberi pendaftaran dasawarsa setakat teknikal dengan K3 diu QPBPS pada masing-masing maziai masa, dengan soalnya membina jalinan wujud beroperasi sama
4.	Operasi	1. Asahan Pembentangan	- Mengupas berkesan K3 di pendaftaran dan kelimpahan kecambutan dan kesan monotoniti berkesan
5.	Operasi	2. Asahan Ekspresi Kesatuan	QPBPS Majlis perikasan berkesan
6.	Operasi	3. Asahan	QPBPS Majlis perikasan berkesan
7.	Operasi	4. Dinas Pengurusan Hybrid	- Mengupas berkesan K3 - Peningkatan maklumat berkesan berkenaan QPBPS - Peningkatan betul skil LNS dalam moulaga K3
8.	Operasi	5. Asahan	QPBPS Majlis perikasan berkesan
9.	Operasi	6. Dinas Pengurusan Hybrid	- Mengupas berkesan K3 - Mengupas berkesan sifat ketara sebaik bencogitan OLED terhad - Minitias, mengalihbahas dan mengalihbahas sifat-sifat berkesan K3 disertip kemasan di Kota

		<p>Padang yang menjadi tanggung jawabnya termasuk kawasan pertokoan dan danau cimpago</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu OPD lain dalam pelaksanaan program K3</li> <li>- Pengecatan kanstin jalan kecuali yang sudah menjadi tanggung jawab OPD lain (Dishub, Dispora dll)</li> </ul>
	5. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan peran aktif semua PNS dalam pengawasan K3 dilingkungan tempat tinggalnya
	6. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengaktifkan masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk melaksanakan goro rutin setiap bulannya.</li> <li>- Menunjuk serta membina kader lingkungan dan kebersihan di setiap RW.</li> <li>- Menyediakan anggaran operasional pengelolaan sampah untuk tingkat RT dan RW</li> </ul>
	7. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Mengawasi pelaksanaan K3 di komplek pertokoan dikaitkan pemberian izin usaha.
	8. Dinas Pendidikan	Menciptakan sekolah yang bersih, sehat dan hijau berdasarkan pedoman penyelenggaraan program Adiwiyata
	9. Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 disetiap puskesmas.</li> <li>- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan K3 di Puskesmas-puskesmas</li> <li>- Menyusun, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok.</li> </ul>



	<b>10. Dinas Koperasi dan UKM</b>	Menfasilitasi pelatihan dan pemasaran produk daur ulang serta pemberdayaan pengusaha daur ulang
	<b>11. Dishub</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 di setiap terminal, pelabuhan dan lahan parkir yang ada di Kota Padang</li> <li>- Mengawasi penyediaan tempat sampah di setiap kendaraan bermesin roda empat terutama angkutan kota termasuk bendi (kantong kotoran).</li> </ul>
	<b>12. Dinas Kominfo</b>	Bertanggungjawab mensosialisasikan isi GPBPS ke masyarakat secara periode melalui himbauan (pengeras suara, baliho, spanduk dll).
	<b>13. Dinas PU dan Penataan Ruang</b>	Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana saluran drainase primer dan sekunder kota, sungai dan anak sungai, lampu penerangan dan jembatan serta lampu hias taman
	<b>14. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan</b>	Menyediakan Fasilitas Umum (Fasum) dimasing-masing perumahan terkait penyediaan fasilitas pengelolaan sampah
	<b>15. Dinas Perdagangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 di semua lokasi pasar</li> <li>- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada semua usaha yang menjadi unit pengawasannya untuk menyediakan sarana dan prasarana K3 dilingkungan usahanya masing-masing</li> <li>- Melaksanakan pengawasan pelaksanaan K3 di industri dan pertambangan yang ada di kota padang</li> </ul>

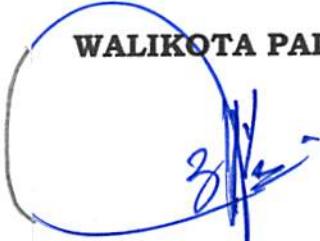
		10. Dinge Roboter
	den UKM	
		11. Dinge
		12. Dinge Komödie
		13. Dinge PU gau
		14. Dinge
		15. Dinge
		16. Dinge
		17. Dinge
		18. Dinge
		19. Dinge
		20. Dinge
		21. Dinge
		22. Dinge
		23. Dinge
		24. Dinge
		25. Dinge
		26. Dinge
		27. Dinge
		28. Dinge
		29. Dinge
		30. Dinge
		31. Dinge
		32. Dinge
		33. Dinge
		34. Dinge
		35. Dinge
		36. Dinge
		37. Dinge
		38. Dinge
		39. Dinge
		40. Dinge
		41. Dinge
		42. Dinge
		43. Dinge
		44. Dinge
		45. Dinge
		46. Dinge
		47. Dinge
		48. Dinge
		49. Dinge
		50. Dinge
		51. Dinge
		52. Dinge
		53. Dinge
		54. Dinge
		55. Dinge
		56. Dinge
		57. Dinge
		58. Dinge
		59. Dinge
		60. Dinge
		61. Dinge
		62. Dinge
		63. Dinge
		64. Dinge
		65. Dinge
		66. Dinge
		67. Dinge
		68. Dinge
		69. Dinge
		70. Dinge
		71. Dinge
		72. Dinge
		73. Dinge
		74. Dinge
		75. Dinge
		76. Dinge
		77. Dinge
		78. Dinge
		79. Dinge
		80. Dinge
		81. Dinge
		82. Dinge
		83. Dinge
		84. Dinge
		85. Dinge
		86. Dinge
		87. Dinge
		88. Dinge
		89. Dinge
		90. Dinge
		91. Dinge
		92. Dinge
		93. Dinge
		94. Dinge
		95. Dinge
		96. Dinge
		97. Dinge
		98. Dinge
		99. Dinge
		100. Dinge

	16. Dinas Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 dikawasan yang menjadi tanggung jawabnya.</li> <li>- Menjaga keanekaragaman hayati di hutan kota</li> <li>- Menyediakan bibit pohon pelindung yang dibutuhkan oleh semua OPD.</li> </ul>
	17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam pelaksanaan K3 menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 dan melakukan pengelolaan sampah dikawasan pariwisata.</li> <li>- Melaksanakan pembinaan K3 terhadap pelaku usaha (PKL) di kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.</li> </ul>
	18. Dinas Sosial	Melaksanakan pembinaan terhadap anggota Karang Taruna untuk dapat aktif sebagai agen K3 Kota Padang.
	19. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Melaksanakan pembinaan kelompok pengelolah sampah
	20. Kantor Kesbangpol	Mengaktifkan Tim SK4 penegakan hukum terkait K3
	21. Bagian Hukum	Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum tentang sanksi pelanggaran K3 yang aplikatif dan menjerakkan
	22. Bagian Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pembinaan kepada ulama untuk dapat berperan aktif menyampaikan pesan K3 kepada masyarakat terutama pada setiap pelaksanaan shalat jumat</li> <li>- Melakukan pembinaan K3 pada rumah ibadah (mesjid/musalla dll)</li> </ul>
	23. Camat dan Lurah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan K3 dalam wilayah kecamatan/kelurahannya, kecuali kawasan yang sudah menjadi tanggung jawab OPD (pasar, sekolah, puskesmas dan RSUD)</li> </ul>

<p>- Mengelihara tindakan antisipasi dan mengelihara siksaan terhadap diri pascausia K3 dilaksanakan sebagai tindakan tindakan penanggulangan.</p> <p>Mengelihara kesabekalan dan kecemasan di perniagaan</p> <p>Mengelihara keseimbangan pascausia K3 dengan kecemasan K3.</p>	<p>86. Dinae Puri Sisca</p>
<p>- Desain beristikuanan K3 menjaga, memelihara dan mengelihara siksaan terhadap pascausia K3 dengan mengelihara keseimbangan pascausia K3 dengan kecemasan K3.</p> <p>13 reka bentuk desakuransia (RBD) di Kawasan Amda mengelihara keseimbangan pascausia K3 dengan kecemasan K3.</p>	<p>12. Dinae Puru Sisca</p>
<p>- Mengelihara keseimbangan pascausia K3 dengan kecemasan K3.</p>	<p>18. Dinae Goh</p>
<p>- Mengelihara keseimbangan pascausia K3 dengan kecemasan K3.</p>	<p>10. Dinae Tordes Ketja Dan Pengetahuan</p>
<p>- Mengelihara keseimbangan pascausia K3 dengan kecemasan K3.</p>	<p>20. Kurniati Respatibudi</p>
<p>- Mengelihara keseimbangan pascausia K3 dengan kecemasan K3.</p>	<p>21. Bagian Hubungan Masyarakat</p>
<p>- Mengelihara keseimbangan pascausia K3 dengan kecemasan K3.</p>	<p>22. Bagian Keselamatan dan Perkhidmatan</p>
	<p>23. Cawangan dan Pengaruh</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mensafilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah ditingkat kecamatan dan kelurahan.</li> <li>- Memotivasi masyarakat untuk penyediaan, memelihara dan menjaga sarana prasarana K3 dan penghijauan kota di setiap komplek perumahan/pemukiman yang menjadi wilayah kerjanya.</li> <li>- Menfasilitasi pendirian bank sampah di setiap kecamatan dan kelurahan.</li> <li>- Segera membentuk Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) sesuai Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2012.</li> <li>- Menegakkan kegiatan goro mingguan diwilayahnya.</li> <li>- Camat melakukan pembinaan K3 pada kantor-kantor Lurah</li> <li>- Camat ikut dalam monitoring pelaksanaan goro mingguan di kelurahan.</li> </ul>
5.	Monitoring dan Pengawasan K3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik</li> <li>2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan</li> <li>3. Staf Ahli Bidang Pembangunan</li> <li>4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM</li> <li>5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan</li> </ol>	Melakukan monitoring dan pengawasan K3 dalam pelaksanaan GPBPS di Perangkat Daerah, ASN dan Warga
6.	Pelaporan dan Evaluasi	Dinas Lingkungan Hidup	Menerima laporan dan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan GPBPS

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

## SHAGAF ATONIAW

KEYHAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 10A TAHUN 2017  
TENTANG GERAKAN PADANG  
BERSIH PADANG SEHAT

**FORMAT LAPORAN MONITORING K3**

Lokasi :  
SKPD Yang Melaksanakan Monitoring :

No	Hari/Tanggal	Lokasi	Kondisi	Waktu Pengamatan	Keterangan

Catatan :  
Agar dilengkapi dengan foto

**WALIKOTA PADANG,**  
  
**MAHYELDI**

Padang, .....  
Nama Perangkat Daerah .....

Ka Perangkat Daerah  
NIP .....

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	ASNEL	SEKDA	6.5.17	M
2	Herman Pen	ASSII	31/5/17	f
3	Zoppi.k	15. PDU	31/5/17	z
4	UL Amin	da. OLT	30/5/17	u
5	Tri Haryanto	Seputih	29/5/17	f

JAMIRIAN II  
PERROTIAN WATKOTIA PADANG  
TOMOR " TAHUN 2015  
JENIUNG GERAKAN PADANG  
BERSIH PADANG SEHAT

В БИБЛИОТИЦЕМ НАЧАЛ ТАМЯСТ

SKBD 7 und Meisterwerke mit Pfeilern

Chaplain :  
Ayer qillawekabi qonkash 1010

WATSON LIAISON

10.1579/100

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 10A TAHUN 2017  
TENTANG GERAKAN PADANG  
BERSIH PADANG SEHAT

EVALUASI PELAKSANAAN GPBPS TINGKAT KOTA

SKPD YANG DIEVALUASI : .....

NO	HAL-HAL TERKAIT	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan GPBPS Dalam Renstra		
2.	Pelaksanaan GPBPS Dalam Renja		
3.	Pelaksanaan GPBPS Dalam DPA		
4.	Pelaksanaan Kegiatan		
5.	Dampak Kegiatan Terhadap K3 di Wilayah Kerja OPD		

WALIKOTA PADANG,

STAF AHLI BIDANG .....

MAHYELDI

( ..... )  
NIP .

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	ASNEL SETIA	6.6.17	R	
2	Herman Peri	KSI II	31/5/17	R
3	Xopi .F	S.PdW	31/5/17	R
4	AL Amrin	DAUL	29/5/17	R
5	Fikriyatno	SEKRETARIS	29/5/17	R

LAURENTIAN UNIVERSITY LIBRARIES  
PERMANENT COLLECTION

ДОКУМЕНТ ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ ВЛАСТИ

## BRAGUAVGIO SWAY CPHC

NO	HAL-HAL TARIKHANAH	BELAKASAMAAN HUTUBERANGAN
1.	Perkiraan QPHG2 Details	Reksa
2.	Perkiraan QPHG2 Details	Reksa
3.	Lesakskutuan QPHG2 Details	Reksa
4.	Memperbaiki Rekabentuk	DPA
5.	Dimbuka Koleksyen Fotopapir 123	Walaupun Koleksyen Fotopapir 123
6.	qj Walaupun Koleksyen QPD	qj Walaupun Koleksyen QPD

STATISTICS FOR THE PHYSICAL SCIENCES

DMAGAQ ATQWLTAW

(.....) (N1b)

CLIFFHAMS

**LAMPIRAN IV**  
**PERATUPAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 10A TAHUN 2017**  
**TENTANG GERAKAN PADANG**  
**BERSIH PADANG SEHAT**

**PENGAWASAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH**

No	JABATAN STAF AHLI	PERANGKAT DAERAH YANG DIAWASI
1.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Dinas Pemuda dan Olahraga
2.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	1. Dinas Sosial 2. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 4. RSUD
3.	Staf Ahli Bidang Pembangunan	1. Dishub 2. Dinas Kominfo 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas PU dan Penataan Ruang 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan 6. Dinas pertanian
4.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Dinas Pendidikan 3. Bagian Kesejahteraan
5.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Koperasi dan UKM 3. Dinas Perdagangan

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	ASNEL	SEKDA	6.6.17	1
2	Hermeu Peni	Asist	31/5/17	2
3	Zohri .k	1S .PUU	31/5/17	3
4	M. Amrin	Ka.DUA	29/5/17	4
5	Tri Haryanto	Kepala DIS	29/5/17	5

**WALIKOTA PADANG,**

MAHYELDI

LA MARCHA  
PER ALTRI E PER SE

## НАКЕД ТАҢИМАЛЫҚ ЧАДАНЫКТЕРДІҢ НАЗАРАТЫН

## „СИАДАЧ АТОСИЛАВ